

**STRATEGI PERCEPATAN PENYUSUNAN
RENCANA DETAIL TATA RUANG DI BANTUL BARAT
TERINTEGRASI OSS (*ONLINE SINGLE SUBMISSION*)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun oleh:

YUDHI PRABOWO

NIT. 21303864

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA**

2025

ABSTRACT

The preparation of the Detailed Spatial Planning for Bantul Barat is a strategic effort to facilitate investment by integrating into the Online Single Submission (OSS) system. This study aims to examine the mechanisms for preparing the RDTR for Bantul Barat, identify the challenges faced, and formulate acceleration strategies that can be implemented. The research employs a mixed-method approach with descriptive qualitative techniques, utilizing data collection through document studies, interviews, and questionnaires. The findings indicate that the mechanism for preparing the RDTR for Bantul Barat includes several main stages: preparation, data collection, data processing, concept formulation, regulation drafting, RDTR establishment, and integration into OSS. The challenges encountered include sectoral ego among agencies, lack of coordination, limited access to accurate data, low community participation, and technical challenges in the integration process with OSS. It was found that data and information factors, as well as human resources, are the two most influential factors in accelerating the RDTR preparation process for Bantul Barat. Suggested acceleration strategies include strengthening local government commitment through the establishment of a Change Action Team, implementing a collaborative cross-sectoral approach, and systematic risk mitigation to support a more efficient, effective, and timely RDTR preparation process.

Keywords: Detailed Spatial Planning; OSS; acceleration of preparation; system integration; spatial planning

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
INTISARI	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Perumusan Masalah	3
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
A. Penelitian Terdahulu	5
B. Kerangka Teoritis.....	10
1. Kebijakan Penataan Ruang.....	10
2. Percepatan Rencana Detail Tata Ruang.....	12
3. Integrasi Rencana Detail Tata Ruang dengan OSS	14
4. Kebijakan untuk Mendukung Investasi	15
C. Kerangka Pemikiran.....	18
D. Pertanyaan Penelitian	19
BAB III METODE PENELITIAN	20
A. Format Penelitian	20
B. Lokasi dan Objek Penelitian	21
C. Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel.....	21
D. Definisi Operasional Konsep atau Variabel.....	23
E. Jenis, Sumber, dan Teknik Pengumpulan Data.....	24
F. Teknik Analisis Data.....	25

BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN	32
A. Wilayah Perencanaan Bantul Barat.....	32
B. Kondisi Bantul Barat.....	33
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	40
A. Mekanisme Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Bantul Barat	40
B. Mekanisme Integrasi RDTR ke OSS (<i>Online Single Submission</i>).....	59
C. Kendala dalam Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Bantul Barat dan Integrasi ke OSS (<i>Online Single Submission</i>)	61
D. Faktor yang Mempengaruhi Percepatan Penyusunan RDTR Bantul Barat dan Integrasinya ke OSS (<i>Online Single Submission</i>).....	64
E. Rekomendasi Strategi Percepatan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Bantul Barat Terintegrasi OSS (<i>Online Single Submission</i>)	84
BAB VI PENUTUP	93
A. Kesimpulan	93
B. Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA.....	95

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pengembangan wilayah merupakan proses mengoptimalkan berbagai potensi yang dimiliki suatu wilayah agar dapat dimanfaatkan secara terpadu guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Nugraha, 2012). Peningkatan peradaban dan semakin bertambahnya kebutuhan manusia menjadi faktor utama yang mendorong terjadinya pengembangan wilayah (Sutaryono, 2007). Pengembangan wilayah bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan berbagai sumber daya, sehingga dapat memberikan manfaat lebih besar bagi kelangsungan hidup manusia maupun makhluk hidup lainnya. Perkembangan suatu wilayah dalam hal struktur sosial dan ekonominya sangat dipengaruhi oleh potensi sumber daya alam, kualitas sumber daya manusia, serta peran lembaga-lembaga terkait, khususnya yang menyangkut penguasaan teknologi, kesiapan tenaga pelaksana, dan ketersediaan dana (Firdaus, 2020).

Pertumbuhan jumlah penduduk yang tinggi dengan luas wilayah yang relatif tetap membuat kepadatan penduduk di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun (Akhirul,dkk, 2020). Seiring dengan adanya pertumbuhan laju penduduk serta pembangunan infrastruktur wilayah mengakibatkan semakin tingginya kebutuhan masyarakat akan ruang untuk melakukan berbagai aktivitas. Hal ini sering berakibat pada distribusi akan ruang yang tidak merata sehingga diperlukan penataan ruang untuk mengaturnya.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan rencana letak untuk penggunaan berbagai jenis lahan yang direncanakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan dan keinginan di suatu wilayah (Muryono & Utami, 2020). Namun yang dibutuhkan dalam penataan ruang bukan hanya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang bersifat rencana umum, pemerintah perlu menyusun dalam rencana rinci yang diwujudkan dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). RDTR merupakan Rencana Detail Tata Ruang yang berupa rencana terperinci terkait tata ruang wilayah kabupaten/kota dan dilengkapi dengan

peraturan zonasi (Sutaryono, 2019). Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pasal 11 ayat (2) menjelaskan bahwa pemerintah daerah kabupaten diberikan kewenangan dalam melaksanakan penataan ruang wilayah kabupaten. Penataan ruang tersebut meliputi perencanaan tata ruang wilayah kabupaten, pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

Kabupaten Bantul merupakan salah satu kabupaten yang terletak di selatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kabupaten Bantul memiliki berbagai potensi baik dalam bidang pertanian, industri, pariwisata, serta perkembangan budaya. Pada tahun 2024, Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul telah menyusun Rencana Detail Tata Ruang yang terbagi dalam 4 wilayah perencanaan yaitu Wilayah Perencanaan Pantai Selatan (Pansela), Wilayah Perencanaan Bantul Barat, Wilayah Perencanaan Bantul Timur, dan Wilayah Perencanaan Perkotaan. Walaupun RDTR Bantul Barat telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bantul Nomor 53 Tahun 2024, namun Perbup tersebut belum sepenuhnya selesai. Muatan dalam Perbup yang ditetapkan hanya berisi batang tubuh peraturan sedangkan untuk data-data lampiran masih belum selesai.

Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) memiliki peran strategis dalam mendukung investasi dan pembangunan daerah. Integrasi RDTR ke dalam OSS (*Online Single Submission*) bertujuan untuk meningkatkan kemudahan berusaha, mempercepat proses perizinan, serta memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam layanan perizinan terpadu yang dikenal sebagai Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Layanan yang unggul berbasis teknologi informasi menjadi salah satu syarat penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*) (Orywika, 2021).

Rencana tata ruang merupakan acuan penting dalam proses penerbitan izin yang memungkinkan investor untuk memulai kegiatan pembangunan di lokasi usahanya. Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) beserta Peraturan Zonasi (PZ)

menjadi dokumen krusial yang dijadikan dasar dalam pengeluaran izin-izin tersebut. Pemerintah terus mendorong percepatan penyusunan RDTR hingga ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Tujuannya agar RDTR dan PZ tersebut dapat mendukung sistem OSS dalam memberikan izin bagi investor secara lebih cepat dan tepat (Santoso, dkk, 2020).

Namun hingga November 2024 menurut data aplikasi PROTARU (Progress Penyelesaian Tata Ruang) dari total kebutuhan di tahun 2024 sebanyak 2000 RDTR, hanya ada 538 RDTR yang terdiri dari 277 RDTR sudah terintegrasi OSS (*Online Single Submission*), sedangkan 261 RDTR belum terintegrasi dengan OSS (*Online Single Submission*). Oleh karena itu diperlukan percepatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul khususnya di wilayah perencanaan Bantul Barat.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2024 tentang RDTR Bantul Barat sebagai salah satu upaya dalam mempercepat penyediaan dokumen tata ruang yang legal dan operasional. Meskipun peraturan tersebut telah ditetapkan, proses penyusunan RDTR Bantul Barat secara keseluruhan belum sepenuhnya selesai, terutama dalam aspek integrasinya ke dalam sistem OSS. Hal tersebut menarik perhatian peneliti untuk mengkaji lebih dalam tentang mekanisme penyusunan RDTR Bantul Barat, proses integrasinya ke OSS, kendala apa saja yang dihadapi dan alternatif solusi untuk mengatasi kendala. Berdasarkan latar belakang tersebut, Peneliti mengajukan penelitian skripsi dengan judul, **“Strategi Percepatan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang di Bantul Barat Terintegrasi OSS (*Online Single Submission*)”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme penyusunan RDTR Bantul Barat ?
2. Apa kendala yang dihadapi dalam proses penyusunan RDTR Bantul Barat dan integrasinya ke sistem OSS (*Online Single Submission*) ?

3. Strategi percepatan apa yang dapat diterapkan untuk mengatasi kendala dalam penyusunan RDTR Bantul Barat hingga tahap integrasinya dalam sistem OSS (*Online Single Submission*) ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui mekanisme yang telah dilaksanakan dalam penyusunan RDTR Bantul Barat.
- b. Untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi selama proses penyusunan hingga tahap integrasinya dalam sistem OSS (*Online Single Submission*).
- c. Untuk merumuskan strategi percepatan atau alternatif solusi untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam proses penyusunan RDTR Bantul Barat dan integrasinya dalam sistem OSS (*Online Single Submission*).

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Akademis

Manfaat akademis penelitian ini adalah menambah wawasan penulis mengenai proses penyusunan RDTR, integrasi RDTR dalam sistem OSS (*Online Single Submission*), dan problematika atau kendala yang dihadapi, serta alternatif strategi percepatan sebagai solusi untuk mengatasi problematika dalam penyusunan RDTR hingga tahap integrasi ke sistem OSS (*Online Single Submission*).

b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis penelitian ini adalah dapat dijadikan masukan untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dan instansi terkait agar proses penyusunan dan integrasi RDTR dalam sistem OSS (*Online Single Submission*) di Bantul Barat maupun wilayah perencanaan lain dapat lebih cepat dan efisien.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Mekanisme penyusunan RDTR Bantul Barat meliputi tahapan: persiapan, pengumpulan dan pengolahan data, perumusan konsep, penyusunan rancangan peraturan, penetapan RDTR. Kemudian dilanjutkan dengan tahap integrasi RDTR ke dalam sistem OSS (*Online Single Submission*).

Kendala utama yang dihadapi meliputi ego sektoral antar instansi, kurangnya koordinasi, keterbatasan data akurat, rendahnya partisipasi masyarakat, serta tantangan teknis dalam proses integrasi, seperti kesulitan unggah dokumen dan ketidaksesuaian format data. Faktor data dan informasi serta faktor sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap percepatan penyusunan RDTR di Bantul Barat.

Strategi dan solusi alternatif yang dapat diterapkan meliputi komitmen kuat dari pemerintah daerah yang telah diwujudkan dalam pembentukan Tim Aksi Perubahan Percepatan Penyusunan RDTR Bantul Barat, penerapan pendekatan kolaboratif dalam perencanaan serta mitigasi risiko yang sistematis untuk memastikan proses penyusunan RDTR berjalan lebih efisien dan efektif.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan, peneliti dapat memberikan saran terkait penyusunan RDTR Bantul Barat dan integrasinya ke dalam OSS sebagai berikut :

1. Diperlukan peningkatan koordinasi dan kerjasama antar instansi guna mengurangi ego sektoral dalam proses penyusunan RDTR. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi yang memiliki fokus pada bidang tata ruang perlu ditingkatkan untuk mendukung kualitas perencanaan.

2. Perlu dilakukan pelatihan bagi tim penyusun dan instansi terkait untuk meningkatkan pemahaman tentang proses penyusunan RDTR serta penggunaan sistem OSS. Partisipasi masyarakat juga perlu diperkuat melalui sosialisasi dan forum diskusi yang lebih intensif, sehingga masukan yang diperoleh lebih representatif. Selain itu, evaluasi berkala terhadap proses penyusunan dan integrasi RDTR ke OSS perlu dilakukan agar langkah-langkah yang diambil tetap relevan dan efektif.
3. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar fokus pada analisis mendalam mengenai dampak dari implementasi RDTR Bantul Barat yang telah ditetapkan terhadap pengembangan wilayah di Bantul Barat.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhirul, Witra, Y., Umar, I., & Erianjoni. (2020). Dampak Negatif Pertumbuhan Penduduk Terhadap Lingkungan Dan Upaya Mengatasinya. *Jurnal Kependudukan Dan Pembangunan Lingkungan*, 1(3), 76–84.
- Al Hakim, R., Mustika, I., & Yuliani, W. (2021). Validitas Dan Reliabilitas Angket Motivasi Berprestasi. *FOKUS (Kajian Bimbingan & Konseling Dalam Pendidikan)*, 4(4), 263. <https://doi.org/10.22460/fokus.v4i4.7249>
- Amanda, L., Yanuar, F., & Devianto, D. (2019). Uji Validitas dan Reliabilitas Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Kota Padang. *Jurnal Matematika UNAND*, 8(1), 179. <https://doi.org/10.25077/jmu.8.1.179-188.2019>
- Angkareda, M., Jl, A., No, K., Ngemplak, K., & Yogyakarta, D. I. (2025). *Perizinan Usaha Berbasis Resiko dan Dampaknya bagi Masa Depan Investasi di Indonesia selanjutnya disingkat OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS*. 2.
- Arsi, A. (2021). Realibilitas Instrumen Dengan Menggunakan Spss. *Validitas Realibilitas Instrumen Dengan Menggunakan Spss*, 1–8.
- Asiva Noor Rachmayani. (2015). Implementasi Sistem Online Single Submission Risk Based Apporach (OSS RBA) Dalam Pelayanan Perizinan Berusaha di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pindtu (DPMPTSP) Kabupaten Semarang. Undip, 6.
- Azhari, D. S., Afif, Z., Kustati, M., & Sepriyanti, N. (2023). Penelitian Mixed Method Research untuk Disertasi. *INNOVATIVE: Journal Social Science Research*, 3(2), 8010–8025.
- Budiman, H., Dialog, B. L., & Anugrah, D. (2020). *Spatial Planning Policy in the Region: Problems and Solutions*. 499(Icolgas), 434–439. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.201209.323>
- Bustomi, T., & Suryadi, S. (2022). Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang di Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka. *ARSY: Aplikasi Riset Kepada Masyarakat*, 3(1), 98–104. <http://journal.al-matani.com/index.php/arsy>,
- Deni Santo, dkk. (2024). *Faktor-Faktor Pengaruh Pada Percepatan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (Rdtr) Di Indonesia Factors Influencing The Acceleration Of Detailed Spatial Plan (RDTR)*. 20(3), 309–324. <https://doi.org/10.14710/pwk.v20i3.64229>
- Dira, A. F., Utomo, K. P., Bangun, M. F. A., Pramularso, E. Y., & Syarief, F. (2023). Pengaruh Investasi dan IPM terhadap Pertumbuhan Ekonomi Hijau di Provinsi Kalimantan Timur. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 11(2), 1437–1446. <https://doi.org/10.37676/ekombis.v11i2.4181>

- Dwisandhyoko, R., & Rachmawati, R. (2016). Peran Serta Masyarakat dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang Selatan. *Jurnal Bumi Indonesia*, 5.
- Fariani, D. (2014). Efektivitas Program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Di Kota Cilegon. *Skripsi*.
- Firdaus, P. (2020). Pengembangan Wilayah Perbatasan Sebagai Upaya Pemerataan Pembangunan Wilayah di Indonesia. *Sol Justicia*, 3(1), 74–82.
- Firmansyah, D., & Dede. (2022). Teknik Pengambilan Sampel Umum dalam Metodologi. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Holistik (JIPH)*, 1(2), 85–114.
- Fitriana, R. (2014). Title. *Procedia Manufacturing*, 1(22 Jan), 1–17.
- Hansen, S. (2020). Investigasi Teknik Wawancara dalam Penelitian Kualitatif Manajemen Konstruksi. *Jurnal Teknik Sipil*, 27(3), 283. <https://doi.org/10.5614/jts.2020.27.3.10>
- Husein Umar. (2011). Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Khusnah, H., & Anshori, M. Y. (2018). Pengaruh Return on Asset, Dividend Payout Ratio, Dan Earning Per Share Terhadap Harga Saham Syariah Perusahaan Yang Terdaftar Di Jakarta Islamic Index (Jii) Tahun 2014-2016. *Accounting and Management Journal*, 2(1), 1–34. <https://doi.org/10.33086/amj.v2i1.67>
- Kultsum, F. (2023). Implementasi Asas Berkelanjutan Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Di Indonesia. *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, Dan Agraria*, 3(1), 1–17. <https://doi.org/10.23920/litra.v3i1.1314>
- Mayasari, I. (2019). Evaluasi Kebijakan Izin Lokasi Dan Pertimbangan Teknis Pertanahan Pasca Penerapan Online Single Submission. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 8(3), 403. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i3.348>
- Miles, M., Huberman, M., & Saldaña, J. (2013). Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook. In *Zeitschrift fur Personalforschung* (Vol. 28).
- Muryono, S., & Utami, W. (2020). Pemetaan Potensi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Guna Mendukung Ketahanan Pangan. *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, 6(2), 201–218. <http://jurnalbhumi.stpn.ac.id/index.php/JB/article/view/431>
- Nazir, M. (2014). *Metode Penelitian*. Penerbit Ghalia Indonesia.
- Novikasari, I. (2017). Uji Validitas Instrumen. *Seminar Nasional Riset Inovatif 2017*, 1(1), 530–535. <https://eproceeding.undiksha.ac.id/index.php/senari/article/download/1075/799>

- Nugraha, A. P. (2012). Evaluasi Pengembangan Wilayah Dalam Meningkatkan Kawasan Agropolitan Di Kabupaten Tabalong. *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan Lokal*, 1(2), 93–105.
- Nugroho, A. W., Addy, L. T., & Wardhani, L. (2020). Analisis Kritis Terhadap Kebijakan Percepatan Investasi dan Kemudahan Berusaha di Era Otonomi Daerah. *Pandecta*, 15(2), 188–197. <http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta%0AAnalisis>
- Nurdiani, N. (2014). Teknik Sampling Snowball dalam Penelitian Lapangan. *ComTech: Computer, Mathematics and Engineering Applications*, 5(2), 1110. <https://doi.org/10.21512/comtech.v5i2.2427>
- Orywika, M. F. (2021). Pengaruh Penerapan Online Single Submission (Oss) Terhadap Perilaku Birokrasi Dan Pelaku Usaha Serta Dampaknya Bagi Percepatan Investasi Di Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. *Jurnal Adhikari*, 1(2), 88–93. <http://dx.doi.org/10.53968/ja.v1i2.31>
- Padilah, T. N., & Adam, R. I. (2019). Analisis Regresi Linier Berganda Dalam Estimasi Produktivitas Tanaman Padi Di Kabupaten Karawang. *FIBONACCI: Jurnal Pendidikan Matematika Dan Matematika*, 5(2), 117. <https://doi.org/10.24853/fbc.5.2.117-128>
- Pambudi, A. S., & Sitorus, S. R. P. (2021). Omnibus Law Dan Penyusunan Rencana Tata Ruang: Konsepsi, Pelaksanaan Dan Permasalahannya Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 11(2), 198–216. <https://doi.org/10.33701/jiwbp.v11i2.2216>
- Priyono, B. (2016). Perizinan Sebagai Sarana Pengendalian Penataan Ruang dalam Perspektif Pemanfaatan Ruang di Daerah. *Jurnal Administrasi Pemerintah Daerah*, VIII(Edisi 2), 16–37.
- Pujiono, P., Sulistianingsih, D., & Sugiarto, L. (2022). Reformasi Birokrasi Perizinan Berusaha Melalui Online Single Submission (Oss). *Arena Hukum*, 15(3), 652–674. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2022.01503.10>
- Saadiya, A. Z., & Najicha, F. U. (2023). Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Dalam Mewujudkan Pembangunan Yang Berkesinambungan. *Jurnal Hukum Positum*, 8(2), 299–316.
- Santoso, E. B., Iswi, A., & Yanuasmara, I. (2020). Innovation, Problem, and Challenges in Preparing Rdtr for Oss: Case in Preparing Rdtr in Eeatern Sendawar, West Kutai Regency, East Kalimantan Province. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 46(1), 230–241. <https://doi.org/10.33701/jipwp.v46i1.1092>
- Sinaga, E. J. (2020). Penataan Ruang dan Peran Masyarakat dalam Pembangunan Wilayah. *Pandecta: Jurnal Peneliti Ilmu Hukum*, 15(2), 242–260. <http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta%0APenataan>

- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi*.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2022). Identifikasi Perilaku Bidang Pengembangan Moral Anak Kelompok B Di Tk It Al-Dhaifullah Desa Betung Kecamatan Abab Kabupaten *Alfabeta, Bandung*, 27–44. <https://repository.unsri.ac.id/106058/>
- Suriani, N., Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Konsep Populasi dan Sampling Serta Pemilihan Partisipan Ditinjau Dari Penelitian Ilmiah Pendidikan. *Jurnal IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 24–36. <https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.55>
- Susilawati Harahap, W. (2020). Teknik Korelasi dan Kolmogorov Smirnov dalam Menganalisis Pengaruh Motivasi Intrinsik dan Peningkatan Kemampuan Menulis KTI Pada Widyaiswara. *Jurnal Teknovasi*, 07, 45–52.
- Sutaryono. (2023). Penataan Ruang Wilayah Kota Partisipatif Berbasis Land Contestation Triangle Model. *Penataan Ruang Wilayah Kota Partisipatif Berbasis Land Contestation Triangle Model*, 01(1), 1–23. <http://repository.stpn.ac.id/id/eprint/3981>
- Sutaryono dan Dewi. (2020). Pemanfaatan Neraca Penatagunaan Tanah Untuk Percepatan Penyusunan Rdtr-Pz. *Jurnal Teknik Hidraulik*, 9(2), 1. <https://doi.org/10.32679/jth.v9i2.626>
- Sutaryono, S. (2019). *Percepatan RDTR Guidance Pembangunan*. 11.
- Ummah, M. S. (2019a). Title. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 11, Issue 1). http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_Sistem_Pembetungan_Terpusat_Strategi_Melestari
- Ummah, M. S. (2019b). Title. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_Sistem_Pembetungan_Terpusat_Strategi_Melestari
- Wahidah, N. R., & Anggraini. (2022). *Berdasarkan Sensus Penduduk tahun*. 9(1).
- Widiawati, Y., Rusli, D., & Andriani, D. (2021). Implementasi Kebijakan Tentang Pemberian Insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal Di Kota Tasikmalaya. *The Indonesian Journal of Politics and Policy (Ijpp)*, 3(1), 13–26. <https://doi.org/10.35706/ijpp.v3i1.5147>
- Widiyantoro, S., & Rineksi, T. W. (2024). Berbagi pakai data spasial pertanahan pada penyusunan rencana detail tata ruang. *Region: Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Perencanaan Partisipatif*, 19(1), 347. <https://doi.org/10.20961/region.v19i1.69856>

- Widiyantoro, S., & Sutaryono, S. (2021). Pemanfaatan Data Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Untuk Penyusunan Produk Penataan Ruang Berbasis Bidang Tanah (Studi Kasus di Desa Alo, Kecamatan Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango). *Seminar Nasional Geomatika*, 471. <https://doi.org/10.24895/sng.2020.0-0.1161>
- Wulandari, A., Aryandi, & Babelia, A. (2021). Penerapan Metode Regresi Linear Berganda Terhadap Pendapatan Dan Keuntungan Harian Pada Penjualan Jajanan Pasar Dengan Software SPSS (Application of Multiple Linear Regression Method on Daily Income and Profit on the Sales of Snack Markets With SPSS Softw. *Fraction*, 1(1), 18–25.
- Zakina, N., Perencanaan, D., Arsitektur, F., & Perencanaan, D. (2018). 33656-83641-1-Pb. 7(2).
- Zellatifanny, C. M., & Mudjiyanto, B. (2018). Tipe Penelitian Deskripsi Dalam Ilmu Komunikasi. *Diakom : Jurnal Media Dan Komunikasi*, 1(2), 83–90. <https://doi.org/10.17933/diakom.v1i2.20>

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Indonesia 1945
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
- Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penyusunan RDTR
- Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 5 Tahun 2022 tentang Integrasi Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
- Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Integrasi Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota ke dalam Sistem Online Single Submission Nomor 1/Juknis - HK.02.02/II/2024